

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., 2011. Performance Measurement and Accountability in Indonesian Local Government (Thesis). Curtin University.
- Akbar, R., Pilcher, R.A., Perrin, B., 2015. Implementing Performance Measurement Systems: Indonesian Local Government Under Pressure. *Qual. Res. Account. Manag.* 3–33. doi:10.1108/QRAM-03-2013-0013.
- Azis, M.I., 2016. Analisis Perbedaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- Bastian, I., 2014. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian, I., 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Ketiga. ed. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- BPKP, 2011. Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Keenam. ed. Pusdiklatwas BPKP, Bogor.
- Cavaluzzo, K.S., Ittner, C.D., 2003. Implementing Performance Measurement Innovations: Evidence From Government. *Account. Organ. Soc.* doi:10.1016/S0361-3682(03)00013-8
- Creswell, J.W., 2014. Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th ed. SAGE Publications, Inc, California.
- DiMaggio, P.J., Powell, W.W., 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality In Organizational Fields. *Am. Sociol. Assoc.* Vol. 48 No. 2.
- Friedman, M., 2005. Trying Hard Is Not Good Enough: How to Produce Measurable Improvements for Customers and Communities, First. ed. FPSI Publishing.
- Gray, R., Owen, D., Adams, C., 1996. Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting. Prentice Hall Europe, London.
- Gudono, 2012. Teori Organisasi, Kedua. ed. BPFE Yogyakarta.
- Halim, A., 2004. Reformasi Akuntansi Keuangan dan Anggaran Daerah: Dua Pilar Utama Manajemen Keuangan Daerah.

- Hennink, M., Hutter, I., Bailey, A., 2012. *Qualitative Research Methods*. SAGE Publications, Ltd, London.
- Jurnali, T., Nabihah, A.K.S., 2015. Performance Management System for Local Government: The Indonesian Experience. *Glob. Bus. Rev.* 16, 351–363. doi:10.1177/0972150915569923
- Knowlton, L.W., Phillips, C.C., 2013. *The Logic Model Guidebook: Better Strategies for Great Results*, Second. ed. SAGE Publications, Inc, United States of America.
- LAN, BPKP, 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*.
- Lohman, C., Fortuin, L., Wouters, M., 2004. Designing A Performance Measurement System: A Case Study. *Eur. J. Oper. Res.* 267–286. doi:10.1016/S0377-2217(02)00918-9
- Longo, P.J., 2002. *The Performance Blueprint: An Integrated Logic Model Developed To Enhance Performance Measurement Literacy: The Case of Performance-Based Contract Management*.
- Mahmudi, 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Kedua*. ed. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahsun, M., 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Pertama*. ed. BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Primarisanti, H., 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, dan Penggunaan Informasi Kinerja*. UGM, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, 2007. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia, 2008. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama*.
- Republik Indonesia, 2010. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.
- Republik Indonesia, 2013. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2013 tentang*

Penetapan Pilot Project Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, 2014. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Republik Indonesia, 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Republik Indonesia, 2016. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4722/M.PANRB/1/2016 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

Sari, I.P., 2015. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Tesis.

Sinclair, A., 1995. The Chameleon of Accountability: Forms and Discourses. *Account. Organ. Soc.* 20 No.2/3 pp. 219-239. doi:10.1016/0361-3682(93)E0003-Y

Sofyani, H., Akbar, R., 2013. Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. *J. Akunt. Dan Keuang. Indones.* Vol. 10 No. 2.

Sugiyono, 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

Utomo, E.W., 2015. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dengan Pendekatan Model Logika Studi Pada Pemerintah Kota Tarakan. Tesis.